



INDONESIA 2008

INDONESIA 2008

THE  NDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research*, didirikan pada Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. The Indonesian Institute adalah sebuah lembaga independen, non partisan dan nirlaba, didanai utamanya dari dana hibah dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan dan perorangan. The Indonesian Institute bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk perbaikan kualitas dari pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru Indonesia.

INDONESIA 2008

@2009, The Indonesian Institute

TIM PENULIS **Peneliti The Indonesian Institute**

Adinda Tenriangke Muchtar
Aly Yusuf
Antonius Wiwan Koban
Benni Inayatullah
Endang Srihadi
Hanta Yuda AR
Nawa Poerwana Thalo

Supervisi: Anies Baswedan, Direktur Eksekutif & Riset

xii, 144 halaman
21 x 30

Diterbitkan oleh:
The Indonesian Institute
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Telepon : (021) 390 5558
Faksimili : (021) 3190 7814
Website : www.theindonesianinstitute.com
e-mail : report@theindonesianinstitute.com

Design & Layout:
harhar muharam, **benang komunikasi**
benang_komunikasi@yahoo.com T. 021-533-2681 F. 021-549-1400

Dicetak Oleh:

Cover Depan:
Tanah Lot, Bali (Gusde Photography)

Kata Pengantar

Tahun 2008 menandai maturitas demokratisasi di Indonesia. Gelombang pertama pemilihan kepala daerah secara langsung telah selesai. Seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (kecuali Jawa Timur) telah melaksanakan pemilihan langsung. Praktek pemilihan langsung di tingkat daerah ini memiliki implikasi besar dalam jangka menengah dan panjang. Janji dan kontrak politik sangat mudah dipantau dan dievaluasi oleh publik. Jarak antara penguasa dan rakyat jauh lebih dekat. Ini merupakan pengalaman berdemokrasi yang luar biasa.

Dengan selesainya gelombang pertama pemilihan kepala daerah, publik pemilih Indonesia memasuki tahun 2009 dengan pengalaman yang sangat berbeda. Publik pemilih berpengalaman menghadapi pilkada yang dipenuhi dengan agenda berorientasi praktis dan lokal. Meskipun faktor ideologis dan politis masih tetap hidup, tetapi faktor kebijakan/*policy* sudah mulai memasuki ranah pemilu.

Janji-janji praktis seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan murah (bahkan gratis), perbaikan infrastruktur, lapangan kerja dan lain-lain menandakan unsur *policy* sudah memasuki ranah pemilu. Pemilu tidak semata-mata mengenai politik ideologi, *money-politics*, atau fanatisme kultural, tetapi pemilu sudah mulai dijadikan arena untuk menggolkan gagasan-gagasan tentang *policy*.

Partai politik, politisi, dan calon presiden berhadapan dengan publik pemilih yang mulai berubah. Perubahan yang terjadi tentu masih parsial, tetapi ini sudah cukup untuk membuat partai politik dan politisi terasansang untuk merubah pendekatannya. Publik pemilih yang baru saja melewati pilkada dengan agenda praktis, dengan mudah menuntut partai politik dan politisi nasional untuk memperhatikan agenda praktis dan juga *grass-root oriented*. Hal ini berpotensi untuk meningkatkan kualitas pemilu 2009.

Tantangan tetap besar, tetapi tanda-tanda kemajuan demokrasi sudah mulai terasa. Dalam konteks itulah, penerbitan “Indonesia 2008” ini banyak memberikan perhatian pada masalah politik. Komponen politik seperti sistem multi-partai, institusionalisasi partai politik, perkembangan politik Islam, dan isu perempuan dalam politik menjadi kajian yang diperbincangkan disini.

Bersamaan dengan dinamika politik domestik yang cukup tinggi ini, kontraksi ekonomi dunia terjadi. Setelah krisis menghempaskan berbagai pelaku ekonomi raksasa di Amerika Serikat, Indonesia mulai merasakan efeknya. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lain, Indonesia mengalami efek yang relatif lebih kecil. Meski begitu, tantangan untuk bisa melewati krisis global ini tetap besar. Dari sinilah maka kajian tentang kondisi dan prospek sektor finansial dan makro ekonomi Indonesia menjadi salah satu bagian dari “Indonesia 2008” ini.

Di sektor sosial, Indonesia 2008 mengkaji masalah pendidikan dan *cash-transfer* yang dijalankan oleh Pemerintah. Program bidang sosial ini memiliki exposure yang sangat tinggi di masyarakat. Secara politispun, program-program di bidang pendidikan dan penguatan sosial ekonomi masyarakat memiliki nilai elektoral yang sangat besar. Persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan program-program pemerintah yang bernuansa dukungan sosial.

Semoga Indonesia 2008 bisa menjadi landasan untuk mereview perkembangan sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Laporan ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu landasan dalam memproyeksikan tren utama di tahun 2009. Selamat membaca.

Anies Baswedan

Direktur Eksekutif & Riset

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Bagan/Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Tabel	ix
Bagian Satu	
Tinjauan Sektor Keuangan	1
Bagian Dua	
Tinjauan Ekonomi Makro.....	15
Bagian Tiga	
Institusionalisasi Partai Politik Indonesia: Dinamika, Karakter, dan Prospek Pemilu 2009	33
Bagian Empat	
Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009	59
Bagian Lima	
Partai Islam: Jalan Terjal Menuju Kemenangan	73
Bagian Enam	
Pemilu Multi Partai, Pemilu Multi Disfungsi	87
Bagian Tujuh	
Potret Perancangan dan Penerapan Sistem Pendidikan Nasional	103
Bagian Delapan	
Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008	119
The Indonesian Institute	135

Daftar Bagan/Gambar

Gambar 8.1	Konsumsi Rata-Rata Minyak Tanah Menurut Kelompok Pendapatan (Liter/Orang/Bulan).....	120
Gambar 8.2	Distribusi Pemanfaatan Subsidi BBM Menurut Kelompok Pendapatan	121
Gambar 8.3	Struktur Organisasi Program Bantuan Tunai Langsung.....	124
Gambar 8.4	Penggunaan Uang BLT	130

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Indeks Saham	3
Grafik 1.2	Emisi	5
Grafik 1.3	Imbal Hasil Obligasi (%).....	6
Grafik 1.4	Sumber Dana	9
Grafik 1.5	Penyaluran Dana	10
Grafik 1.6	Pertumbuhan Kredit Menurut Penggunaan	11
Grafik 1.7	LDR vs NPL.....	12
Grafik 1.8	Laba Rugi	13
Grafik 1.9	Pertumbuhan Laba Rugi (%)	13
Grafik 1.10	Pertumbuhan Aset vs ROA.....	14
Grafik 2.1	Perkembangan Inflasi Tahunan (%).....	16
Grafik 2.2	Indikator Utama AS	16
Grafik 2.3	Defisit Fiskal (% dari PDB)	17
Grafik 2.4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	18
Grafik 2.5	PDB Indonesia.....	18
Grafik 2.6	Harga Minyak	19
Grafik 2.7	Harga Komoditas Pertanian, 2008	20
Grafik 2.8	Realisasi Investasi Agrobisnis (Trilyun Rp)	21
Grafik 2.9	Pertumbuhan Penjualan TPT (%)	22
Grafik 2.10	Perdagangan Internasional Non-Migas	23
Grafik 2.11	Komposisi Importir Dunia (%).....	24
Grafik 2.12	Nilai Tukar Rp/12	25
Grafik 2.13	Nilai Tukar Terhadap Dolar AS.....	26
Grafik 2.14	Cadangan Devisa (per November)	27
Grafik 2.15	Cadangan Devisa	28
Grafik 2.16	BI Rate	28

Daftar Grafik

Grafik 2.17	Tingkat Bunga	29
Grafik 2.18	Rata-rata Suku Bunga.....	30
Grafik 2.19	Kondisi Keuangan Dunia Usaha.....	30
Grafik 2.20	Kondisi Dunia Usaha	31
Grafik 2.21	Pajak	32
Grafik 2.22	Belanja Pemerintah	32
Grafik 3.1	Hasil Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) Oktober 2008.....	52
Grafik 3.2	Hasil Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) Desember 2008	53
Grafik 5.1	Partai yang paling Islamis (versi LSI)	75
Grafik 5.2	Partai Paling islami (versi LSN)	76
Grafik 5.3	Hasil Survey CSIS tentang Pilihan Masyarakat terhadap Partai Politik 2009	82
Grafik 5.4	Partai yang akan Dipilih bila Pemilihan Anggota DPR dilakukan Sekarang.....	83
Grafik 7. 1	Rata-rata besar biaya pendidikan per satu orang siswa (2002-2003)	112
Grafik 7. 2	Rata-rata persentase beban biaya pendidikan total yang ditanggung oleh orangtua siswa dan Pemerintah (2008)	112
Grafik 7. 3	Tingkat pengangguran terdidik (1994-2008)	116



Daftar Tabel

Tabel 3.1	Hasil Pemilu Anggota DPR 1955	37
Tabel 3.2	Hasil Pemilu Anggota DPR 1971	39
Tabel 3.3	Perolehan Kursi DPR Hasil Pemilu 1977 – 1997	40
Tabel 3.4	Jumlah Partai Politik di Indonesia (1973 - 2004)	41
Tabel 3.5	Peringkat Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPR Hasil Pemilu 1999.....	47
Tabel 3.6	Peringkat Partai Politik yang Memperoleh Kursi di DPR Hasil Pemilu 2004	49
Tabel 3.7	Tren Penyederhanaan Kekuatan Politik di Parlemen (1999 - 2009) .	54
Tabel 4.1	Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik.....	60
Tabel 4.2	Pasal-pasal dalam UU Parpol yang mengatur keterlibatan perempuan dalam politik.....	61
Tabel 4.3	Pasal-pasal dalam UU Parpol yang mengatur keterlibatan perempuan dalam parpol lokal.....	62
Tabel 4.4	Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009 yang memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan	63
Tabel 4.5	Perempuan dalam struktur kepengurusan DPP Partai (2005-2010) ..	64
Tabel 4.6	Parpol peserta Pemilu Legislatif 2009 yang gagal memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.....	65
Tabel 4.7	Beberapa ketentuan internal parpol terkait <i>affirmative action</i>	70
Tabel 5.1	Perolehan suara Partai Pemilu 1999	77
Tabel 5.2	Perolehan Suara Partai Islam 2004	79
Grafik 5.3	Hasil Survey CSIS tentang Pilihan Masyarakat terhadap Partai Politik 2009	82
Grafik 5.4	Partai yang akan Dipilih bila Pemilihan Anggota DPR dilakukan Sekarang.....	83

Daftar Tabel

Tabel 6.1	Perkembangan Pemilu dari Tahun ke Tahun	88
Tabel 6.2	Perubahan Substansi Pemilu.....	89
Tabel 6.3	Jumlah Perempuan di DPR RI (1950 -2009).....	91
Tabel 6.4	Perbandingan Jumlah Perempuan Di DPR Setiap Partai Politik.....	92
Tabel 6.5	Proporsi Caleg Perempuan Tiap Partai Pada Pemilu 2009.....	93
Tabel 6.6	Lima Besar Caleg Perempuan Parpol Untuk DPR RI di Bawah Kuota 30 Persen	93
Tabel 6.7	Lima Besar Caleg Perempuan Parpol Untuk DPR RI di Atas Kuota 30 Persen	94
Tabel 6.8	Hasil Perolehan Pemilu	96
Tabel 7.1	Strategi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (2000-2020).....	105
Tabel 7.2	Produk Hukum Turunan dari UU Sisdiknas Nomor 20/2003 (berdasarkan substansi materi dan relasi substansi materi).....	108
Tabel 8.1	Kriteria RTS Menurut BPS	125
Tabel 8.2	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program BLT-RTS 2008	126
Tabel 8.3	Realisasi Bayar Nasional Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 Tahap I (Per 10 Desember 2008)	127
Tabel 8.4	Realisasi Bayar Nasional Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 Tahap II (Per 10 Desember 2008)	128
Tabel 8.5	Prosentase Jenis Penggunaan Uang BLT	131



INDONESIA 2008

Bagian Satu

TINJAUAN SEKTOR KEUANGAN

— Nawa Thalo —

***“I can calculate the motion of heavenly bodies,
but not the madness of people”***

— Fisikawan Inggris Sir Isaac Newton (1643-1727) —

Kepanikan. Demikianlah gambaran kondisi sektor keuangan dunia –yang sangat mempengaruhi Indonesia– terutama sejak pada paruh kedua tahun 2008. Perhatian seluruh dunia tertuju pada Amerika Serikat (AS), sebagai episentrum gempa finansial terdahsyat sejak era depresi hebat (*great depression*) 1929.

Berkali-kali Presiden AS George W. Bush mengadakan konferensi pers untuk menenangkan para agen ekonomi dan menyatakan bahwa Pemerintah AS akan sekuat tenaga mengupayakan agar apa yang terjadi di Wall Street (bursa saham) tidak melebar ke “*Main Street*” (kemampuan ekonomi pemerintah). Paman Sam siap menggelontorkan dana talangan (*bail-out*) sebesar 700 miliar dolar untuk menolong para keponakannya yang tengah terjerat krisis surat utang kredit perumahan (*subprime mortgage*).

Namun tetap saja, indeks saham terus meleleh. Para pemilik modal semakin dihantui kepanikan. Tanpa berpikir panjang, mereka melakukan penyelamatan dengan melarikan dana yang mereka miliki (*flight for safety*). Mereka berekspektasi bahwa kondisi ekonomi akan memburuk dan menarik dana secara masif. Akibatnya, kondisi benar-benar memburuk. Inilah fenomena yang disebut oleh Robert Merton sebagai “takdir yang memenuhi dirinya sendiri” (*self-fulfilling prophecy*).

Sudah menjadi hal lumrah bahwa investor memiliki perilaku kawanan (*herd behavior*). Kelakuan segerombol investor akan diikuti oleh gerombolan investor lainnya, sebagaimana terungkap dari hasil riset pemenang Nobel ekonomi Daniel Kahneman dan Amos Tversky, bahwa investor memiliki rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*).

Badai berita buruk terus-menerus mengguncang pasar keuangan. Satu kepanikan menyulut api bagi kepanikan lainnya dan menghilangkan rasa saling tidak percaya di antara lembaga keuangan. Korban pun berjatuh seperti kartu domino. Lehman Brothers, raksasa bank investasi yang dengan setia mengiringi perekonomian AS melalui perang dunia dan berbagai kemelut ekonomi politik internasional, kini menyerah. Bertekuk lutut menyatakan diri bangkrut.

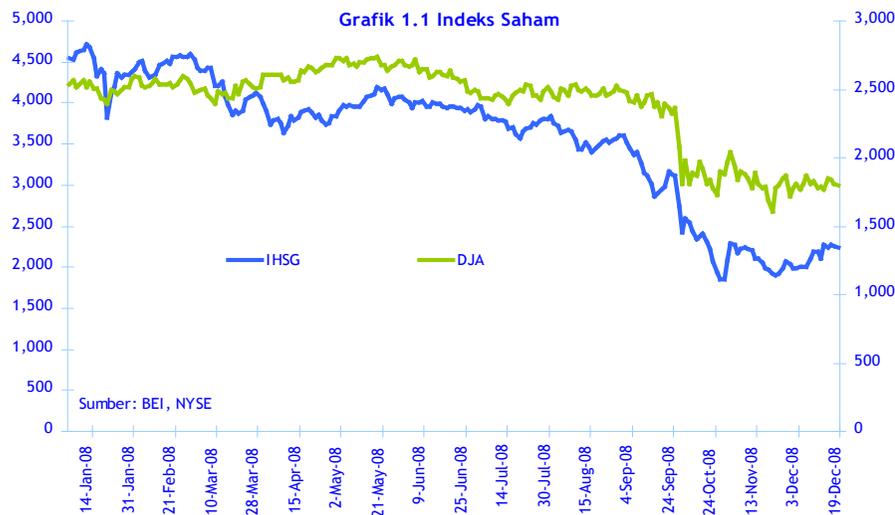
Sebagaimana terlihat pada Grafik 1.1 berikut, indeks saham gabungan AS –yang diwakili oleh indeks Dow Jones Average (DJA) dari Bursa Efek New York (NYSE)– ambruk ke titik terendah 2670 pada 20 November 2008 lalu. Padahal pada 2 Januari 2008, indeks tersebut masih dengan gagah bertengger pada *level* 4231. Sedangkan IHSG–yang pada 2 Januari 2008 masih berada pada level 2732–terjerembab, menjadi hanya 1111 pada 28 Oktober 2008.¹

Jika kita hitung dengan formula koefisien korelasi, dimana:

$$R = \frac{\sum_i [(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})]}{\sqrt{\sum_i [(x_i - \bar{x})^2] \sum_i [(y_i - \bar{y})^2]}}$$

maka akan kita dapati bahwa kedua indeks memiliki keterkaitan yang sangat tinggi, yakni sebesar 90 persen. Maka tidak heran, seperti terlihat pada grafik, pergerakan kedua indeks terlihat seirama. Bedanya, kejatuhan IHSG lebih dalam ketimbang kejatuhan DJA. Selama rentang waktu awal Januari 2008 hingga pertengahan Desember tahun yang sama, DJA hanya rontok sebesar 29 persen. Sedangkan IHSG sebesar 51 persen. Kejatuhan IHSG jauh lebih dalam dari kejatuhan DJA, dimana sumber krisis berada.

¹ Untuk menyelamatkan pasar saham dari kehancuran yang berlarut-larut, pemerintah ketika itu merencanakan program pembelian kembali (*buy back*) saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena saham BUMN memiliki tingkat kapitalisasi yang besar. *Buy back* diharapkan dapat menolong agar indeks tidak jatuh lebih dalam. Langkah *buy back* ini ternyata juga diikuti oleh perusahaan swasta.



Penyebabnya ialah IHSX merupakan indeks saham di pasar negara berkembang (*emerging market*) yang pemerintahnya mengimplementasikan rejim devisa bebas. Di satu sisi, investasi di pasar negara berkembang seperti Indonesia cenderung menghasilkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi (*abnormal return*) ketimbang berinvestasi di pasar saham negara maju seperti di AS.

Ini adalah alasan mengapa meskipun tingkat risikonya lebih tinggi, berinvestasi di pasar saham negara berkembang cenderung lebih menarik ketimbang di pasar saham negara maju. Ini terbukti dengan sering tampilnya Bursa Saham Indonesia sebagai salah satu bursa saham dengan kinerja terbaik di dunia.

Ini dimungkinkan karena diterapkannya rejim devisa bebas di tanah air. Namun konsekuensinya, Indonesia juga harus pula merasa siap jika terjadi arus pembalikan modal (*capital reverse*) yang disebabkan oleh turbulensi keuangan seperti akhir-akhir ini. Sebab, pengimplementasian rejim devisa bebas tanpa adanya perbaikan institusional yang fundamental hanya akan mengundang masuk uang panas (*hot money*) yang dapat keluar-masuk kapan saja.

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah: jika terdapat untung-ruginya, apakah penerapan rejim devisa bebas selama ini menguntungkan ekonomi Indonesia? Jawabannya ialah: ya.

Rejim devisa bebas menjamin para pemilik dana untuk bebas menggunakan –menanamkan dan menarik– dananya kapan saja sesuai kemauan mereka. Hal ini mendorong mereka untuk berbong-bondong menanamkan uangnya pada berbagai instrumen keuangan yang ditawarkan di Indonesia, baik saham maupun obligasi, baik obligasi pemerintah (*sovereign bonds*) maupun obligasi perusahaan swasta (*corporate bonds*).

Dengan kata lain, rejim devisa bebas merupakan upaya pemerintah untuk membuat pasar modal Indonesia menarik di mata investor asing. Upaya ini mendatangkan hasil. Bursa saham dan obligasi Indonesia semakin semarak. Berbagai indikator pasar modal menunjukkan angka yang indah. Likuiditas berlimpah, tingkat bunga pun rendah.

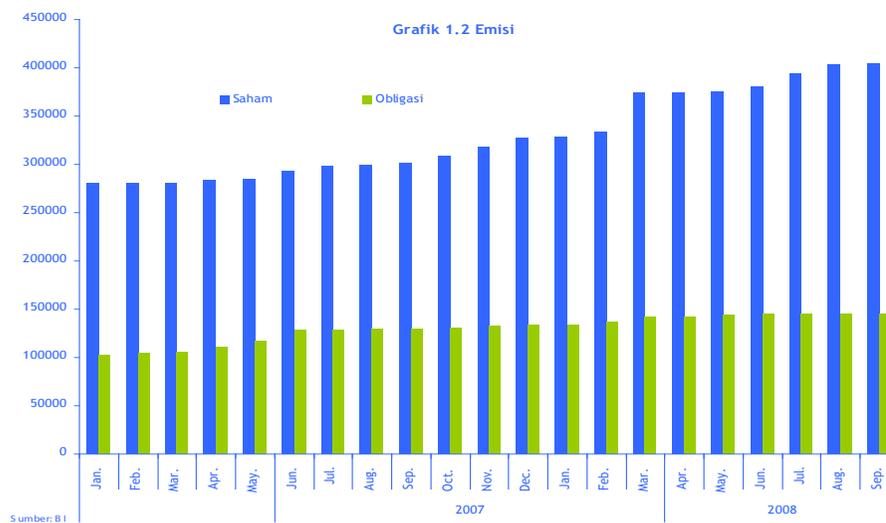
Maraknya pasar modal mendorong perusahaan untuk menerbitkan surat berharga dengan tujuan menggali dana masyarakat –dalam hal ini investor– yang ditujukan untuk baik untuk membayar utang yang jatuh tempo, mendanai keperluan operasional, maupun ekspansi bisnisnya, sehingga perusahaan mampu bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, perusahaan tidak perlu lagi menganggap perbankan sebagai satu-satunya tempat untuk mencari pinjaman. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan rejim devisa bebas itu sendiri tidak serta-merta menjamin tingginya emisi surat berharga. Sentimen penerbitan surat berharga oleh dunia usaha dipengaruhi oleh berbagai indikator ekonomi makro-mikro. Salah satunya ialah suku bunga-yang sangat ditentukan oleh tingkat inflasi.

Artinya, meskipun suatu negara menerapkan rejim devisa bebas tapi suku bunganya cenderung tinggi, maka hal tersebut tetap saja tidak kondusif bagi penerbitan surat berharga, terutama obligasi. Sebagai contoh, dengan banjirnya likuiditas suku bunga akan cenderung rendah. Namun, jika inflasi meroket yang disebabkan oleh terganggunya jaringan distribusi makanan (*supply shock*), maka suku bunga juga akan ikut melompat.

Sepanjang tahun 2008, penerbitan (emisi) surat berharga mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Untuk saham, selama tahun 2008 pertumbuhan *year-on-year* (*yoy*) terjadi setiap tahun (Grafik 1.2). Jika pada bulan Januari pertumbuhannya sebesar 17,1 persen, pada bulan September pertumbuhannya sudah mencapai

34 persen. Hal ini tentu menggembirakan di tengah melesunya kinerja indeks saham jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari upaya pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mendorong perusahaan untuk melakukan penawaran perdana di pasar saham.



Jika emisi saham menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, sayang tidak demikian dengan emisi obligasi. Bahkan, apa yang terjadi dengan emisi obligasi justru terbalik dengan yang dialami saham. Pada bulan Januari, emisi obligasi masih bertumbuh sebesar 30 persen. Namun, angka pertumbuhan terus merosot hingga pada bulan September hanya tersisa sebesar 12 persen.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penerbitan surat berharga—terutama obligasi—sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sejak akhir tahun 2007 hingga akhir tahun 2008 angka inflasi terus terkerek naik.

Kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan BBM merupakan sebab utama memanasnya angka inflasi. Bahkan menjelang triwulan IV 2008 angka inflasi domestik oleh inflasi yang berasal dari barang-barang impor karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang cenderung melemah.

Menjawab tantangan inflasi, Bank Indonesia (BI) mau tidak mau menjalankan kebijakan moneter yang kontraktif dengan menaikkan suku bunga acuan (“BI Rate”). Menaiknya BI rate mengisyaratkan tingginya imbal hasil (*yield*) atas surat utang perusahaan yang

diminta oleh investor. Hal ini tentu mengurungkan niat dunia usaha untuk menggalang dana melalui penjualan obligasi. Akibatnya, emisi obligasi pada tahun 2008 tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Pada tahun 2009, tingkat inflasi diperkirakan akan melemah seiring dengan turunnya harga minyak di pasar dunia dan harga BBM domestik. Melemahnya konsumsi masyarakat akibat kenaikan upah yang tertunda juga diperkirakan akan memperlemah laju inflasi dari sisi tarikan permintaan (*demand pull*). Dengan demikian, kita akan menyaksikan penurunan BI rate yang pada akhirnya kondusif bagi pelaksanaan emisi obligasi.

Kondisi pasar sendiri diperkirakan akan pulih sering dengan kembali masuknya modal asing ke berbagai instrumen investasi, terutama instrumen investasi yang memiliki resiko paling rendah di pasar modal, yakni surat utang pemerintah. Grafik 1.3 di bawah ini mengindikasikan hal tersebut.

Pada 27 Oktober 2008, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia (INDO-14) melonjak ke level 15,758 persen. Ini menggambarkan adanya pelepasan obligasi tersebut oleh para investor. Namun, meskipun sempat mengalami lompatan lagi, pada akhir November imbal hasil sudah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Ini menunjukkan minat investor yang pulih terhadap obligasi tersebut.



Turunnya imbal hasil obligasi pemerintah tentu berdampak kondusif bagi penerbitan obligasi sektor swasta karena dengan demikian biaya emisi obligasi bagi pihak swasta menjadi lebih murah.

Bahkan, iklim pasar surat utang yang kondusif tidak hanya terjadi di pasar domestik. Sebagaimana terlihat pada Grafik, berdasarkan data Departemen Keuangan AS (*US Department of Treasury*) imbal hasil obligasi AS terus melorot. Ini memberikan gambaran bahwa obligasi pemerintah AS tengah diburu para investor.

Tentu saja, hal tersebut merupakan kabar gembira bagi para penerbit. Situasi seperti ini tentu menguntungkan pemerintah Indonesia yang dalam waktu mendatang bermaksud menerbitkan surat utang di pasar internasional.

Kondisi Perbankan

Di Indonesia, pemerintah dari masa ke masa terlihat memajukan sektor perbankan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat Indonesia merupakan perekonomian berbasis bank (*bank-based economy*), seperti halnya Jepang, Jerman dan sebagian besar negara di dunia lainnya. Berbeda dengan AS maupun Inggris yang merupakan perekonomian berbasis pasar finansial (*financial market-based economy*).

Dengan kata lain, bagi Indonesia, bank merupakan sumber utama bagi pembiayaan aktivitas ekonomi. Rusaknya sistem perbankan akan mengakibatkan hancurnya perekonomian nasional.

Secara umum, perbankan nasional aman dari krisis keuangan AS, karena memang tidak ada bank di Indonesia yang terlibat dalam kepemilikan *subprime mortgage* di AS. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kecemasan akan keringnya likuiditas tetap melanda kalangan perbankan dan dunia usaha.

Kasus Bank Century misalnya, perlu mendapat perhatian khusus, meskipun kondisi bank tersebut tidak mencerminkan industri perbankan secara keseluruhan. Patut disyukuri pula bahwa kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional masih tinggi.

Sebagaimana terlihat pada Grafik 1.4 berikut, sepanjang tahun 2008 dana pihak ketiga (DPK) terus mengalami pertumbuhan. Bahkan pada bulan September DPK mengalami lonjakan dibanding bulan sebelumnya. Namun jika kita melihat pertumbuhan tahunan (*yoy*), pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Oktober.

Terus meningkatnya suku bunga bank di satu sisi dan tidak menentunya pasar keuangan di sisi lain telah memicu pertumbuhan dana masyarakat di dalam sistem perbankan nasional. Bahkan, jika dilihat pada grafik, pertumbuhan DPK tidak hanya dalam mata uang rupiah, tapi juga mata uang dolar AS.

Lonjakan simpanan dalam dolar AS terutama terjadi pada bulan Oktober, yakni sebesar 28 persen. Lompatan ini jauh melebihi angka pertumbuhan DPK itu sendiri sebesar 18 persen. Melemahnya nilai rupiah *vis-à-vis* dolar AS dapat menjelaskan fenomena lonjakan tersebut.

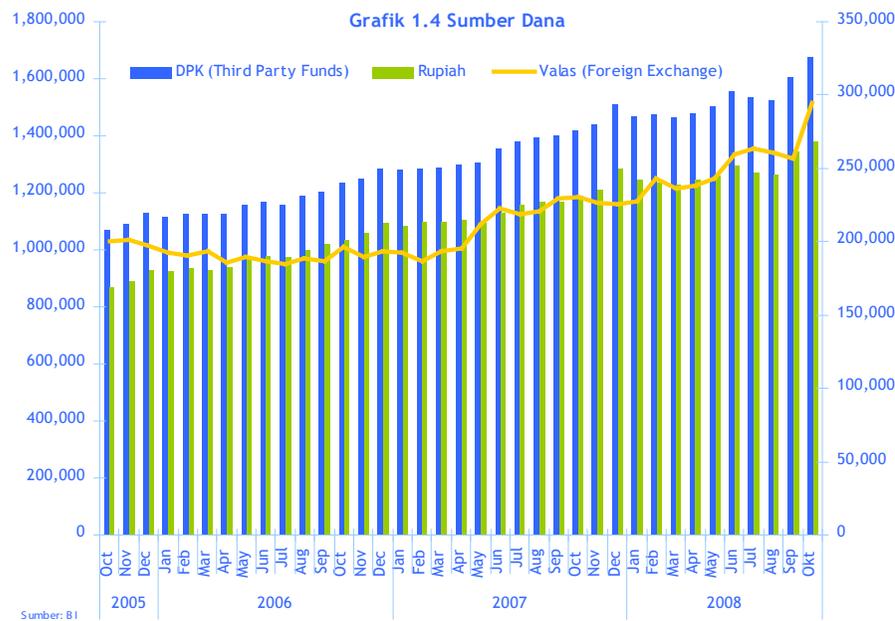
Namun, hal yang masih perlu mendapat perhatian ialah buruknya komposisi jangka waktu simpanan masyarakat di bank. 92 persen dana masyarakat yang ada di bank ditanam dalam deposito bertenor satu hingga enam bulan. Sedangkan yang ditanam dalam deposito bertenor lebih dari 12 bulan hanya sebesar 0,8 persen.

Inilah yang menyebabkan mengapa sektor perbankan sangat sulit mendanai proyek berjangka panjang seperti infrastruktur. Mereka khawatir pendanaan infrastruktur dapat mengakibatkan ketidaksesuaian jatuh tempo (*maturity mismatch*).

Buruknya komposisi jangka waktu simpanan masyarakat di bank sudah terjadi sejak sektor perbankan dilanda krisis sekitar 10 tahun lalu. Mungkin penyebabnya saja yang berbeda.

Pada masa krisis, masyarakat menyimpan uangnya dalam deposito bertenor sangat pendek karena kehilangan kepercayaan pada sektor perbankan. Kini, alasannya ialah karena masyarakat sudah mulai beralih dari *saving society* (masyarakat menabung) menjadi *investing society* (masyarakat berinvestasi).

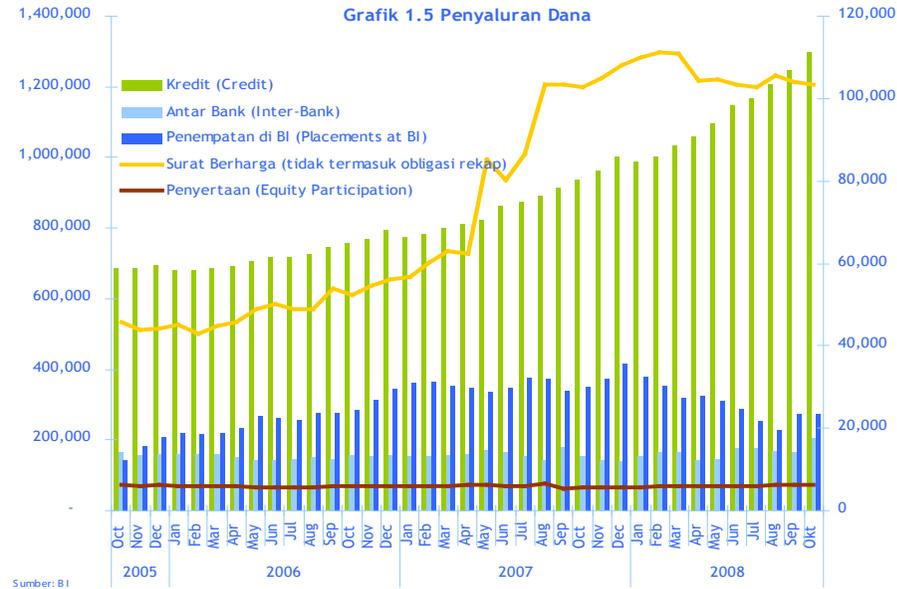
Hal tersebut sangat mungkin. Semakin tingginya kesadaran asuransi masyarakat, edukasi terhadap wadah berinvestasi yang semakin baik, dan banyaknya instrumen keuangan yang ditawarkan secara ritel telah menggeser dana masyarakat dari bank ke lembaga keuangan non-bank (LKNB), seperti perusahaan asuransi, pasar modal, dan dana pensiun.



Lalu, bagaimana dengan penyaluran dana tersebut? Di tengah meningkatnya tekanan inflasi sejak awal tahun, hingga Oktober 2008 kinerja perbankan nasional mengalami peningkatan. Kredit terus bertumbuh (Grafik 1.5). Rata-rata pertumbuhan tahunan paling tinggi dinikmati oleh sektor pengangkutan-perdagangan-komunikasi, pertambangan, serta sektor listrik-gas-air.

Hal ini dapat dimengerti. Tingginya harga produk-produk pertambangan selama tahun 2008, tingginya konsumsi masyarakat, serta penggalakan proyek infrastruktur yang semakin giat mendorong sektor perbankan untuk terus mendanai sektor-sektor tersebut. Namun, kita dapat memperkirakan bahwa sektor-sektor tersebut kemungkinan besar tidak lagi mendapat prioritas pendanaan lagi dari perbankan.

Anjloknya harga produk-produk pertambangan serta melemahnya konsumsi masyarakat merupakan penyebab utama kondisi tersebut. Di sisi lain, meningkatnya penyaluran kredit dibarengi dengan menurunnya penempatan di BI. Ini merupakan perkembangan yang menggembirakan. Fungsi intermediasi yang dijalankan kalangan perbankan semakin dapat dirasakan.



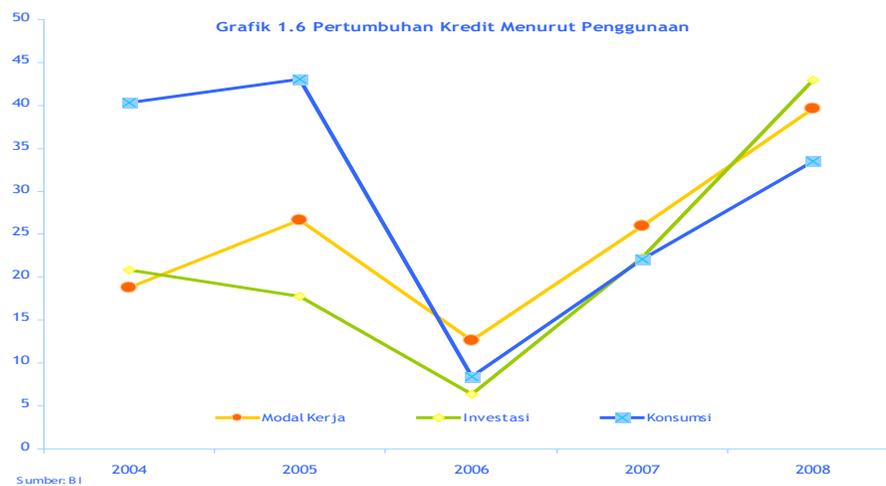
Hal menarik yang perlu diperhatikan ialah menurunnya penempatan dana pada surat-surat berharga. Sejak awal Februari 2007 hingga sampai puncaknya pada bulan Maret 2008, perbankan sangat bergairah untuk menanamkan dananya pada surat-surat berharga. Namun, sejak bulan April hal tersebut tidak lagi terjadi. Ini merupakan langkah tepat, mengingat selang beberapa bulan kemudian harga surat berharga anjlok.

Fenomena semakin menarik kita temukan ketika mengetahui bahwa dari seluruh kredit yang dikucurkan, kredit investasi bertumbuh paling kencang pada tahun 2008, seperti terlihat pada Grafik 1.6. Sebagai gambaran, pada tahun 2004-2005 kredit konsumsi tumbuh paling tinggi.

Sedangkan pada tahun 2006-2007, kredit modal kerjalah yang menikmati pertumbuhan paling tinggi. Dengan demikian, keberpihakan sektor perbankan terhadap kredit investasi terealisasi pada tahun 2008.

Dari sisi dunia usaha, bertumbuhan kredit investasi yang tinggi menunjukkan bahwa gairah penanaman modal baru maupun ekspansi usaha sudah bangkit. Namun, apakah pertumbuhan kredit investasi yang tinggi akan terus berlanjut hingga tahun 2009?

Krisis ekonomi membuat dunia usaha pesimis akan hal tersebut. Dari sisi perbankan pun, resiko kredit akan mengalami peningkatan, terutama bagi sektor-sektor yang berorientasi ekspor ke AS, Eropa maupun Jepang. Dari sisi perbankan sendiri, hal yang kini perlu diwaspadai ialah naiknya angka kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*).

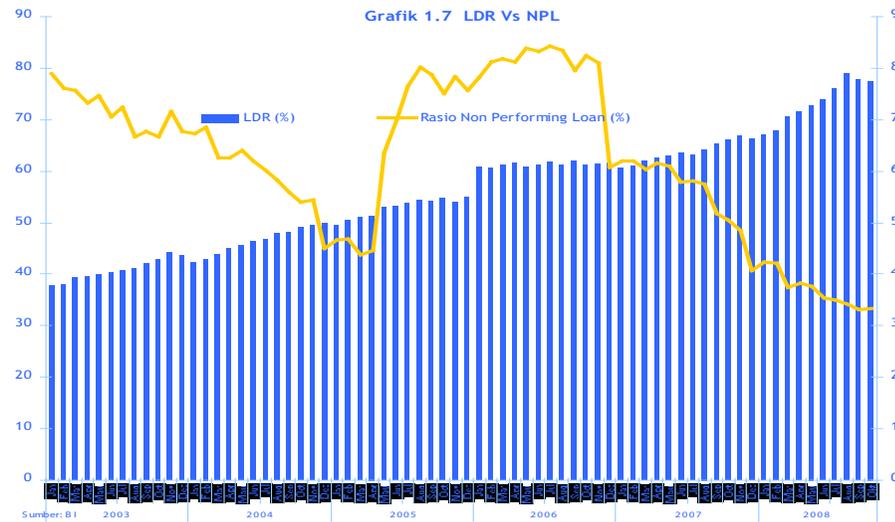


Patut disyukuri bahwa rasio NPL menurun dari waktu ke waktu. Kalaupun selama tahun 2008 NPL sempat mengalami kenaikan, namun secara umum kecenderungannya memperlihatkan penurunan (Grafik 1.7), meskipun tahun 2008 merupakan tahun dimana angka inflasi merangkak naik.

Hal yang menggembirakan ialah bahwa selama tahun 2008 NPL justru berbanding terbalik dengan rasio pinjaman terhadap deposito (*loan to deposit ratio/LDR*). Padahal, merupakan hal logis apabila bertumbuhnya LDR diikuti oleh kenaikan NPL. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya ialah semakin baiknya manajemen resiko perbankan.

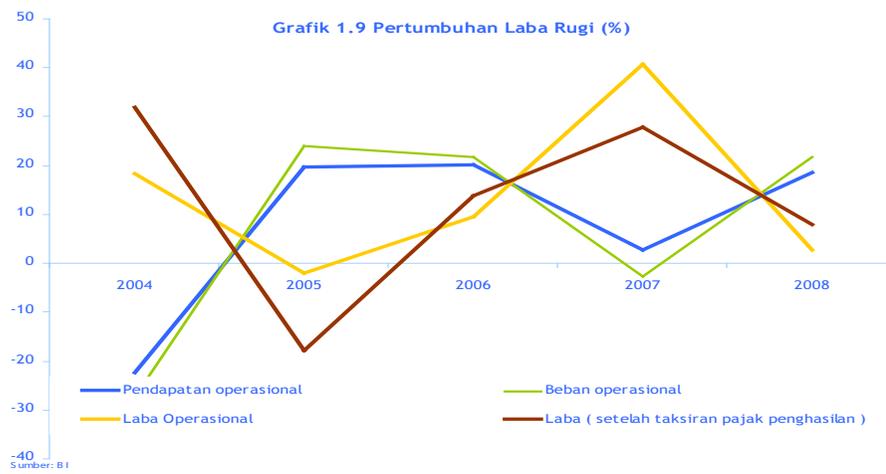
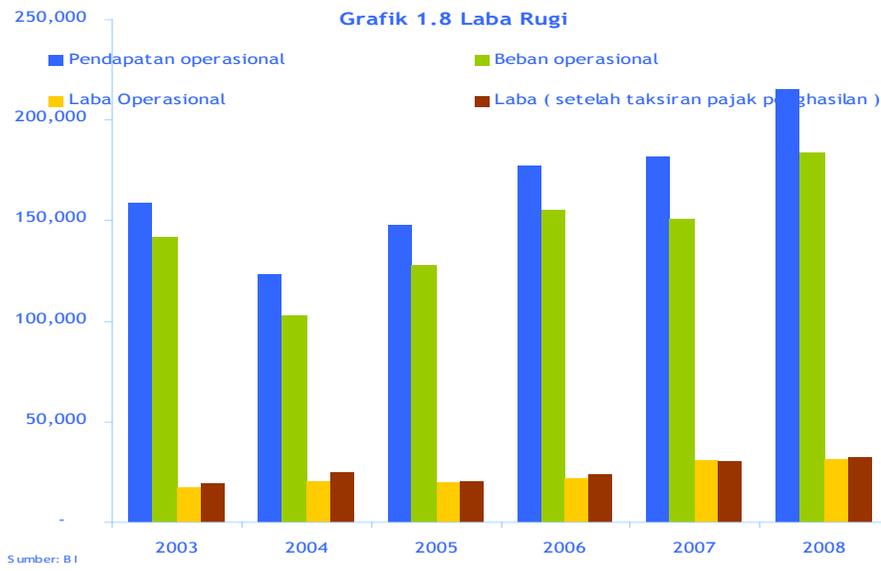
Rendahnya NPL menjadi cerminan kuatnya fundamental industri perbankan nasional. NPL netto kini hanya sekitar 1,4 persen. Angka ini jauh di bawah batas maksimum sebesar lima persen.

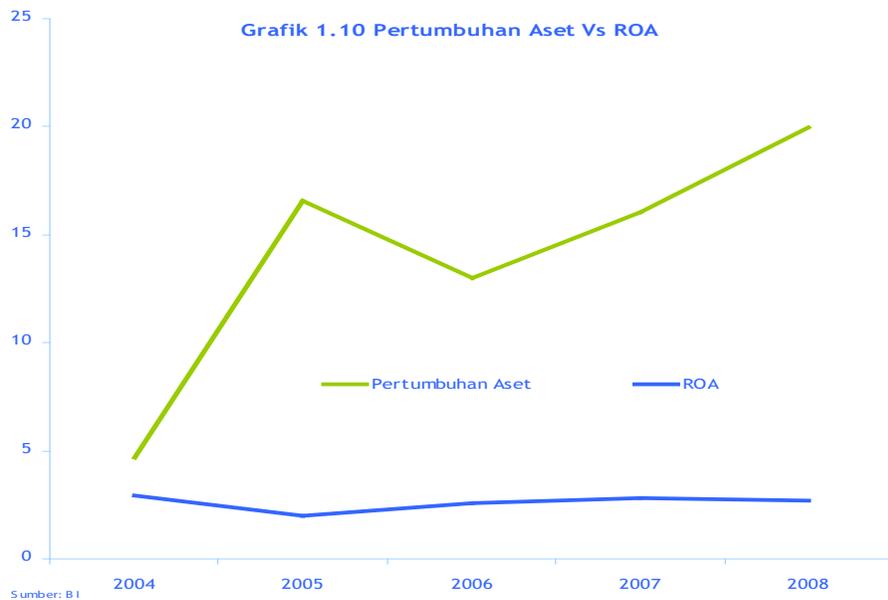
Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mesih mencapai 17 persen. Angka ini jauh di atas angka minimum yang ditetapkan sebesar delapan persen. Dengan demikian, perbankan nasional masih sangat mampu untuk melanjutkan fungsi intermediasinya.



Cerahnya kinerja penyaluran kredit perbankan ternyata tidak seindah profitabilitasnya. Berbeda dengan tahun 2007 lalu. Tingkat efisiensi yang semakin baik dan kemampuannya dalam menekan biaya dana membuat perbankan memperoleh laba yang signifikan.

Ternyata pada tahun 2008 kondisinya berbeda. Seperti terlihat pada Grafik 1.8 dan 1.9 berikut, meskipun pendapatan operasional industri perbankan mengalami kenaikan, pada saat yang sama beban operasional juga meningkat. Akibatnya, pertumbuhan laba anjlok. Selain menghadapi peningkatan beban operasional, perbankan juga harus meningkatkan cadangan provisinya. Sedikitnya laba yang diperoleh menyebabkan tingkat pengembalian atas aset (*return on assets/ROA*) relatif tidak berubah, meskipun nilai aset perbankan terus bertumbuh. (Grafik 1.10)





Bagian Dua

TINJAUAN EKONOMI MAKRO

— Nawa Thalo —

Ketika memasuki tahun 2008, ekonomi Indonesia sudah menghadapi tantangan berupa meningkatnya tekanan inflasi. Sebagaimana terlihat pada Grafik 2.1 di bawah ini, angka inflasi menunjukkan kecenderungan (*trend*) menguat sejak akhir 2007.

Penguatan terus berlanjut pada tahun 2008. Terus meningkatnya harga minyak di pasar internasional memicu ekspektasi inflasi dan pada akhirnya inflasi aktualnya. Angka inflasi bahkan melonjak ketika pada 24 Mei 2008 pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata sebesar 29 persen hingga mencapai puncaknya pada bulan September sebesar 12,14 persen.

Menguatnya inflasi pada akhir tahun 2007 hingga pertengahan 2008 disebabkan oleh beragam faktor mulai dari hari besar keagamaan, bencana alam yang menyebabkan ketidakpastian stok pangan nasional, perubahan iklim yang membuat siklus pertanian menjadi bergeser, hingga semaraknya penggunaan *biofuel* yang membuat harga komoditas pertanian di pasar dunia meningkat. Dengan demikian, tekanan inflasi tidak hanya dirasakan Indonesia, tapi juga ekonomi global.